



Dugaan Korupsi KPU Sigi

KPU Sulteng Desak Kejari

SIGI, MERCUSUAR- KPU Sulteng meminta dan mendesak ketegasan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Donggala, terkait penangan dugaan korupsi anggaran Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur (Pilgub) Sulteng 2011 yang dikelola oleh KPU Kabupaten Sigi.

Sekretaris KPU Sulteng, Mukmin menyatakan, jumlah anggaran Pilgub yang dikelola KPU Sigi yang diduga sarat masalah itu sebesar Rp5 miliar, dan dana Silpa 2010 sebesar Rp76 juta.

"Kasus tentang penggunaan dana Pilgub dan dana Silpa telah ditangani Kejari Donggala. Oleh karena itu kami memberikan kuasa penuh pihak kejaksaan untuk menangani kasus ini sampai tuntas, agar semuanya bisa terungkap dan secepatnya dapat diketahui siapa aktor dibalik ini semua," kata Mukmin.

Menurut Mukmin, pembuatan laporan pertanggungjawaban dana Pilgub yang dilakukan KPU Sigi tidak jelas. Sampai saat ini belum juga

diselesaikan, dan KPU Provinsi tetap mendesak KPU Sigi memasukkan laporan pertanggungjawaban secepatnya, walaupun kasus ini sudah masuk ke ranah hukum. Sebab, kata Mukmin merupakan kewajiban KPU Sigi untuk membuatnya, karena mereka yang menggunakan uang dan mereka juga yang harus mempertanggungjawabkannya.

"Ketua, anggota, bendahara, sekretaris dan seluruh jajaran KPU Sigi yang bertanggungjawab dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dana Pilgub dan dana Silpa. Oleh sebab itu, jika nantinya laporan pertanggungjawaban tidak selesai dan menemui jalan buntu, mereka akan diberikan sanksi keras yaitu berupa pemecatan," ungkapnya.

Selama ini, KPU Sigi khususnya bendahara dan Ketua KPU-nya tertutup dalam memberikan informasi kepada KPU Provinsi Sulteng.

Baca **DESAK** di hal. 11

Ketua KPU Sigi Juga Mendukung

• DESAK

sambungan dari hal. 1

Namun, hal itu tidak menghalangi KPU Provinsi untuk tidak mengetahui kecurangan yang mereka lakukan.

"Semua kebobrokan KPU Sigi akan terbongkar pastinya di kejaksaan, olehnya pihak Kejari Donggala harus dapat membongkarnya secara gamblang dan tidak plin-plan," kata Mukmin.

Pelaksanaan Pilgub Sulteng 2011 telah lama usai, Longki Djanggola-Sudarto yang jadi pemenang pun telah lama dilantik, namun hingga saat ini, KPU Sigi belum bisa bertanggung jawab atas penggunaan dana Pilgub sebesar Rp 5 miliar.

"Seharusnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pelaksanaan Pilgub Sulteng sudah masuk ke Sekretariat KPU Sulteng selambat-lambatnya dua bulan se usai pesta demokrasi Pilgub dilaksanakan. Sayangnya,

hingga batas waktu yang ditentukan, tak selebar pun laporan keuangan dari KPU Sigi yang diterima. Berbagai alasan konyol yang telah dilontarkan pihak KPU Sigi untuk menutupi lambanya memasukan laporan penggunaan anggaran mereka selama ini," katanya.

KPU Sulteng juga melihat tidak ada keseriusan KPU Sigi untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban mereka, terlihat dengan tidak adanya mereka muncul lagi ke KPU Sulteng untuk menyelesaikan laporan itu.

"Sudah lama pihak KPU Sigi tidak datang untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban mereka. Hal ini memperlihatkan mereka memang tidak serius untuk secepatnya menyelesaikan laporan penggunaan anggaran yang mereka gunakan, tetapi KPU Sulteng tidak

akan ambil pusing dengan sikap mereka. Karena kalau montok KPU Sigi tidak dapat menuntaskan laporan penggunaan anggarannya, KPU Sulteng akan secepatnya memberikan sanksi tegas dan pihak kejaksaan pastinya secepatnya menahan pelaku-pelakunya," sesalnya.

Terpisah, Ketua KPU Sigi Moh Fahri meminta kasus yang membelit KPU Sigi dapat secepatnya diselesaikan oleh pihak Kejari Donggala, agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan berbagai pihak yang ingin mencari keuntungan dari permasalahan tersebut.

"Kejari Donggala harus dapat mengusut tuntas kasus yang membelit KPU Sigi sekarang ini, dan pihak kami mendukungnya secara penuh jika pihak kejaksaan Donggala ingin meminta keterangan," tegasnya. **MG2**